

● Wawasan

Orang Indonesia Berbahasa Indonesia

Kritik dan Evaluasi



Ariel Heryanto

Pengantar

Ariel Heryanto, sebuah nama yang tiba-tiba berkibar dalam perbincangan sastra Indonesia kontemporer. Perhatiannya terhadap sastra memang besar; dan untuk itu ia telah menghasilkan sebuah buku yang diberi nama *Perdebatan Sastra Kontekstual* yang kontroversial itu. Ia juga pernah memenangkan penulisan puisi Radio Australia dan, yang penting, beberapa tahun lalu ia mengaji ilmu sastra, dan lulus sebagai master, pada sebuah universitas di Amerika.

Tapi minat Ariel, yang kini jadi dosen di Universitas Satya Wacana, Salatiga, terhadap bahasa nyatanya lebih besar lagi. Dalam bidang bahasa — satu bidang yang bagi kita mungkin dianggap tidak penting, tapi bagi Ariel justru sebaliknya — pikirannya benar-benar mengugat dan, karena itu, melawan arus. Ia menghojat kekuasaan, lembaga bahasa, dan pikiran formal ahli bahasa. Kalau kita berbicara tentang bahasa, katanya kepada Alizami Ramli dan Ifdhal Kasim dalam sebuah wawancara yang panjang lebar, maka kita juga harus berbicara tentang siapa yang berbahasa.

Sebuah bangsa yang diminta berbahasa satu berarti permintaan agar bangsa itu mempunyai satu cara memahami dan membangun kenyataan sosial.

Pemikiran tentang bahasa, baik tentang fungsi dan hakekatnya disini jarang sekali dilakukan. Pemikiran yang dominan masih berputar-putar di sekitar soal tata-bahasa, awalan dan akhiran. Pertanyaan kami: bagaimana menurut Anda pemikiran mengenai bahasa yang berkembang di sini, dan apakah diperlukan pengkajian kembali secara mendasar terhadap pemikiran yang dominan itu?

Pengkajian kembali terhadap pemikiran tentang bahasa yang kini dominan di Indonesia sudah menjadi kebutuhan mendesak, bagi saya.

Ini lebih penting daripada, misalnya saja, persoalan kesusastraan kita. Karena berbagai sebab yang nggak perlu saya omongkan sekarang di sini, belakangan ini saya sering diajak berbincang tentang sastra oleh banyak teman. Tapi menurut saya, sebenarnya kita mesti lebih banyak berpikir tentang bahasa daripada sastra dalam kondisi kesejarahan Indonesia masa ini. Kalau jaman kita lain, mungkin soalnya lain lagi. Sekarang ini di Indonesia, yang disebut sastra itu cuma menjadi keasyikan nol koma sekian persen bangsa Indonesia. Dan yang nol koma sekian persen itu pun tidak bersastra terus-terusan dalam kehidupan mereka. Tapi bahasa? Setiap dan keseluruhan warga bangsa kita terlibat. Dan keterlibatannya hampir setiap detik dalam kehidupan sehari-harinya.

Pentingnya pengkajian mendasar tentang persoalan berbahasa kita itu bukan saja karena faktor kuantitatif di atas. Bukan hanya karena persoalan itu melibatkan nasib kesejahteraan warga bangsa ini secara menyeluruh. Tapi juga, dan mungkin yang terutama, karena hampir-hampir tidak adanya pemikiran alternatif yang secara mendasar mempertanyakan atau menyangga pemikiran yang kini teramat dominan di Indonesia itu.

Apa pemikiran tentang bahasa yang dominan itu? Untuk semestinya ini, kita omong secara garis besar dulu saja. Kita tengok yang paling pokok dulu. Pertama, bahasa di anggap sebagai sekedar *alat* komunikasi. Atau alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Untuk menyatakan dan memperbaikkan kenyataan. Dalam pemikiran begini, bahasa dianggap terpisah dari kenyataan. Di satu pihak ada yang dibilang kenyataan. Di pihak lain, ada yang dianggap jadi alat untuk menyatakan atau memperbaikkan kenyataan itu.

Karena dianggap hanya sebagai alat, maka bahasa pada umumnya dianggap netral, yang dapat diperalat untuk macam-macam tujuan. Dianggap bahwa bahasa itu baru menjadi tidak netral jika dipakai untuk tujuan tertentu. Bisa baik, bisa tidak. Saya tak setuju dengan pemikiran demikian. Akan saya jelaskan ketidak setujuan saya nanti. Sekarang saya teruskan pokok pikiran lain tentang bahasa yang kini sedang dominan.

Kedua, dalam pemikiran yang dominan tadi juga dinyatakan bahwa bahasa itu merupakan suatu konvensi atau perjanjian. Menurut saya pandangan demikian bisa menyesatkan. Ada suatu masyarakat pada suatu masa sejarah, yang berbahasa sebagai suatu konvensi. Tapi ada banyak pada masa ini yang tidak begitu. Di Indonesia saat ini, kehidupan berbahasa Indonesia tidak lagi produk dari suatu musyawarah konvensi atau perjanjian. Tapi pemaksaan, dari pihak yang berkuasa di atas sana bagi mayoritas tak berkuasa yang di bawah.

Ketiga, mengenai ilmu bahasa. Karena bahasa hanya dianggap

sebagai alat yang terpisah dari kenyataan, maka ilmu bahasa yang kini dominan memusatkan perhatian pada ciri-ciri formal kebahasaan. Misalnya ejaan, tata-bahasa, atau arti kata ala kamus. Selama ini jutaan siswa dan mahasiswa kita dicekoki pelajaran macam begitu.

Dengan begitu, belajar tentang bahasa bagi mereka seperti belajar tentang mesin. Tentang bekerjanya perkakas atau alat yang dibilang alat berkomunikasi. Jadi semacam belajar tentang bongkar-pasang onderdil bahasa. Aspek kemanusiaan dalam kebahasaan diingkari.

Pandangan alternatif yang kita butuhkan sekarang ialah pandangan yang mengakui dan memperhitungkan aspek kemanusiaan dalam bahasa. Pandangan bukan tentang *bahasa* (kata benda), tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang *berbahasa* (kata kerja). *Kalau kita berbicara tentang berbahasa, maka mau tak mau kita mesti berbicara tentang siapa* yang berbahasa. Dan siapanya itu bukan manusia (dengan M besar) yang diabstrakkan, yang statis, yang universal. Tapi bermacam ragam manusia yang tak lepas dari berbagai liku-liku perjalanan sejarah di bumi yang nyata ini.

Bisakah Anda menerangkan lebih lanjut asumsi-asumsi teoritis itu dengan mengaitkannya pada realitas pemakaian bahasa di sini?

Untuk menjawab secara konkret pertanyaan Anda itu, dalam kaitan dengan uraian saya tadi, kita lihat saja suatu situasi nyata yang terbatas. Mari kita tengok kampanye nasional tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar itu.

Menurut saya, kampanye itu merupakan ekspresi yang khas dari tiga macam asumsi mendasar mengenai bahasa yang saya omongkan di atas tadi. Bahwa bahasa itu alat, bahwa bahasa itu suatu konvensi, dan ilmu bahasa itu terutama diartikan sebagai ilmu otak-atik onderdil perkakas kebahasaan

Nggak ada bahasa macam apa pun yang baik dan benar secara obyektif. Yang ada hanyalah sebentuk atau tepatnya lagi beberapa bentuk kegiatan *berbahasa* yang oleh sebagian atau beberapa pihak *dianggap* baik dan benar. Jadi nilai baik dan benar itu tidak lain daripada produk manusianya. Manusia yang nggak pernah bebas dari kepentingan-kepentingan ideologis yang menjalari berbagai bidang kehidupannya. Jadi manusia bukan sebagai individu, tapi mahluk sosial. Maka kalau mau omong soal bahasa yang baik dan benar, kita mesti bicarakan soal baik dan benar menurut siapa? Demi kepentingan ideologis macam apa? Dalam konteks kesejarahan bagaimana? Dan seterusnya.

Menurut yang punya kuasa, bahasa yang baik adalah bahasa yang cocok dengan orang yang diajak bicara, atau yang cocok dengan situasi. Bahasa yang benar, menurut mereka, adalah bahasa yang cocok dengan aturan berbahasa yang dibakukan. Menurut mereka, bahasa yang baik tidak harus berarti bahasa yang baku.

Saya punya kritik terhadap ide dasar kampanye bahasa yang mera�ela itu. Saya pernah dengar beberapa kritik orang lain tentang ini. Tapi menurut saya, kritik-kritik mereka itu tak ada yang bersifat mendasar atau radikal. Yang di kritik cuma soal-soal praktis: bagaimana ide-ide dasar itu dipraktekkan. Yang mereka kritik bukan ide-ide dasarnya itu sendiri. Karena itu saya merasa perlu menawarkan



kritik-kritik saya yang lebih mendasar. Tapi sebelumnya, saya kasih contoh-contoh konkret tentang kritik-kritik umum yang tak radikal itu.

Misalnya, ada kritik: masa kita kog selalu diminta berbahasa baik dan benar, juga di pasar atau pinggir jalan. Menurut saya, kritik ini berangkat dari kesalah-pahaman terhadap paham yang memang salah. Tapi sudah saya katakan, pihak sponsor kampanye bahasa baik dan benar itu tidak bermaksud meminta orang selalu berbicara dengan

bahasa baku pada setiap situasi. Kritik lain berbunyi: bikin pedoman bahasa baik dan benar kog berganti-ganti saja, bikin kita bingung. Ini juga bukan kritik yang mendasar. Kritik yang lain lagi: Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap semestinya menjadi teladan berbahasa Indonesia baik dan benar kog malah menyeleweng dari resep-resep resmi yang dibakukan.

Kritik saya tidak melulu pada soal-soal yang praktis begitu. Saya berangkat dari ide dasar mereka. Pertama soal bahasa yang baik. Lalu akan saya omongkan soal bahasa yang benar.

Terhadap pikiran tentang bahasa yang "baik", saya punya beberapa kritik. Pertama, yang paling enteng, tapi gamblang dan sederhana dulu. Kalau yang dimaksudkan dengan bahasa "baik" itu adalah bahasa yang cocok dengan situasi dan orang yang berbahasa, semestinya kan kita tak butuh pihak ketiga atau wasit yang merasa lebih tahu sudah cocok atau belumnya bahasa dua pihak yang berkomunikasi.

Kedua, para pelopor dan jaigoan kampanye bahasa itu membayangkan situasi dan bahasa sebagai dua hal yang berdiri sendiri-sendiri. Misalnya, istilah *cewek* dibilang sebagai istilah yang tak resmi. Diresepkan, kalau kita berbicara dalam situasi resmi, kita mesti memakai istilah *wanita* atau *gadis*. Seakan-akan ke-tidak-resmi-an istilah *cewek* itu terkandung di dalam istilah itu sendiri secara intrinsik, bebas dari situasi. Begitu juga kerensian istilah wanita atau *gadis*.

Padahal situasi dalam bis-kota untuk umum, atau becak, atau apa sajalah yang biasa dianggap situasi santai alias tak resmi bisa menjadi resmi, gara-gara orang berbicara dengan kata-kata seperti *wanita* atau *gadis*. Sebaliknya juga, pidato atau ceramah ilmiah yang biasa dianggap sebagai situasi resmi bisa jadi tidak atau kurang resmi jika disampaikan dengan berbagai kata-kata semacam *cewek*. Pokoknya, maksud saya kerensian situasi ditentukan sedikit-banyak, antara lain, oleh bahasa. Dan kerensian bahasa ditentukan oleh suasannya. Masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri. Selalu terjadi dialektika di antaranya. Jadi dinamis begitu. Tidak beku yang menjadi ciri khas pembakuan.

Ketiga, dalam kenyataannya kita tak punya pedoman yang baku tentang situasi yang resmi dan situasi yang tak resmi. Mana ada? Bagaimana mungkin bisa ada? Jadi kalau para tokoh kampanye bahasa itu cuma membakukan beberapa ciri bahasa baku, kita tak pernah bisa yakin dalam batasan situasi macam apa bahasa baku itu mesti dipakai.

Lalu, tentang bahasa yang benar. Kita omongkan saja bahwa Indonesia baku itu. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan terhadap praktek pembakuan itu ialah: siapa yang berhak menentukan apa yang baku dan apa yang tidak; sahan hak itu; apa dasar pembakuan itu?

Sementara ini ada anggapan kuat, hak itu milik orang-orang sekolah yang dianggap menjadi kaum ahli dalam bidang bahasa. Kalau mau di sambung lagi, kita perlu tanyakan sekolah kita selama ini menjadi milik siapa (bukan secara ideal tapi dalam kenyataan)? Ada pihak lain yang menyatakan bahwa hak itu datang dari kekuasaan negara yang dimandatkan kepada beberapa ahli untuk itu. Kalau kita percaya bahwa kekuasaan negara itu sah, soalnya sudah sedikit ringan. Artinya jika kekuasaan negara atau pemerintah itu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar secara demokratis. Lha, kalau tidak, atau belum, atau kurang?

Ada juga anggapan umum yang kuat bahwa dasar pembakuan itu ialah ketetapan pengertian, logika dan kebenaran obyektif. Dan ini dianggap hal-hal yang dikuasai dengan baik oleh orang-orang sekolah yang ahli. Pertama-tama, saya nggak percaya ada pengertian, kebenaran, atau kenyataan yang obyektif. Juga jika dibilang berdasarkan logika. Logika itu sendiri tidak netral dan obyektif. Apa yang kini oleh orang-orang sekolah kita dianggap logika itu, pada umumnya adalah *sejenis* logika orang Barat. Salah satu produk sejarah sosial Eropa. Tidak universal sifatnya. Masyarakat-masyarakat lama Nusantara, seperti juga masyarakat lain, punya tradisi berlogika sendiri yang kini tergeser sejarah dan tak banyak dikenali kaum tersebut Indonesia sendiri. Bagaimana mesti kita tempatkan logika Jawa "ngono ya ngono neng ojo ngono" atau "sing ana ora ana, sing ora ana, ana" dalam logika kaum tersebut Indonesia yang ke-Barat-Barat-an? Kan repot! Apa kita bisa bilang ucapan-ucapan Jawa itu tak logis?

Dalam sejarah Eropa sendiri terdapat lebih dari satu jenis pemikiran dan "logika". Tapi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh sejenis logika sebagaimana kita kenal di sekolah-sekolah kita sekarang. Konsep dialektika yang pernah dikembangkan Hegel, misalnya, kurang tampak dalam pemikiran banyak ahli.

Terpilihnya sejumlah kata-kata yang diresmikan oleh yang berwenang sebagai kata-kata baku, bukanlah produk dari suatu perhitungan logika yang obyektif. Pemilihan itu tidak pernah netral, dan tak pernah mungkin dapat netral. Selalu berpihak. Selalu ada yang lebih diuntungkan daripada yang lain. Tidak kebetulan, misalnya, jika dalam daftar panjang kata-kata yang dibakukan itu terdapat banyak kata-kata "baru" yang diambil dari bahasa Jawa Kuna atau Sansekerta. Perkembangan mutakhir bahasa Indonesia bukan sekedar perkembangan "nasional", tetapi juga peng-Krama-an.

Moga-moga Anda nggak jadi bingung, kalau tadi saya bilang ada logika Jawa yang terdesak, sekarang saya bilang ada peng-Krama-an. Lihat saja Pembangunan Nasional kita sekarang. Sulit untuk membandingkan baik warna "Barat" mau pun ke "priyayi" an Jawa sekaligus

Belajar bahasa ibarat orang membongkar-pasang onderdil. Aspek kemanusiaan dalam berbahasa jadinya diingkari.

di dalamnya.

Jadi, sejauhmana pembakuan bahasa diperlukan?

Banyak teman yang mendengarkan uraian saya semacam tadi itu mendapatkan kesan bahwa saya beranggapan tidak perlu ada aturan berbahasa sama sekali. Sebenarnya bukan begitu.

Hidup bermasyarakat, dan berbahasa, adalah hidup yang keteraturan. Saya tidak anti tata-tertib. Setiap kehidupan yang sehat membutuhkan ketertiban. Baik kehidupan jasmaniah mau pun sosial. Persoalannya ialah aturan macam apa atau aturan siapa yang kini mengatur kehidupan kita?

Banyak teman berkeyakinan bahwa kita membutuhkan satu bahasa, atau satu tata-tertib pembakuan bahasa nasional bagi keutuhan bersatu bangsa. Saya tak berkeberatan dengan ini. Soalnya kemudian, bahasa yang satu untuk semua itu bahasa kayak apa? Bahasa siapa? Ini soal yang rumit.

Sebuah bangsa yang diminta berbahasa satu berarti permintaan agar bangsa itu mempunyai kesatuan kesadaran, satu selera, satu cara memahami dan membangun kenyataan sosial. Sebab, bahasa, kesadaran sosial dan kenyataan itu tidak terpisah-pisah. Kalau ternyata bahasa satu yang dipilih itu adalah bahasa orang atas, maka alam pikiran dan nilai hidup yang diberlakukan bagi keseluruhan masyarakat adalah alam kesadaran dan nilai orang atas juga.

Apa akibatnya?

Orang yang hidup di bawah tapi berbahasa dan berkesadaran hidup orang atas adalah orang-orang yang terasing dari kehidupan nyata di dunia bawah itu. Orang miskin yang punya pikiran seperti orang kaya. Hal itu tidak dengan sendirinya membuat si miskin jadi lebih kaya. Tapi merana. Karena keterbelahan di antara kehidupan nyatanya dan alam pikirannya.

Rakyat di lapisan bawah masyarakat yang diharuskan berbahasa dengan aturan-aturan yang dibikin dari atas, adalah rakyat yang hidup dalam ketergantungan. Ia tak lagi bisa mandiri menyatakan apa yang digeluti dalam kehidupannya secara langsung. Ia mesti tanya dan belajar mengemukakan hal-hal itu dari aturan-aturan orang atasan. Perhatikan bagaimana sekarang orang-orang sekolah kita antri berbondong-bondong pada rubrik atau kantor pembinaan bahasa Indonesia yang dianggap baik dan benar. Mereka tidak lagi mampu menyatakan cinta kasih, keharusan, kemarahan, protes, atau informasi secara spontan dan otentik. Mereka diharuskan menyatakan suatu dalam aturan yang dianggap resmi, yang dianggap baik dan benar. Dan sekali mereka menggunakan aturan itu, kemungkinan besar akan ada banyak dari apa yang semula hendak dikemukakan punah. Sebab setiap bentuk komunikasi membatasi kemungkinan isi komunikasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk itu. Bentuk dan isi komunikasi tak pernah dapat dipisah-pisahkan.

Banyak orang sekolah berkeyakinan bahwa bahasa seseorang mencerminkan pikiran dan perasaan orang yang berbahasa itu. Jadi, orang yang berbahasa dianggap baik dan benar, akan diasumsikan mempunyai pikiran yang baik dan benar. Padahal untuk menguasai bahasa Indonesia yang diresmikan sebagai bahasa baik dan benar itu, seseorang

mesti menduduki posisi cukup tinggi dalam masyarakat dan uang cukup banyak. Ia mesti belajar bahasa seperti itu di sekolah, dan dia mesti bergaul dengan banyak orang-orang kelas menengah atau atas yang berbahasa seperti orang sekolah itu.

Jadi, kan gawat kalau logika seperti itu dituruti terus. Kaum tak berpangkat dan tak berduit mempunyai peluang yang relatif kecil untuk berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Kaum yang tak bersepatu, tak berduit, ini akan cenderung dianggap sebagai orang-orang yang tak punya pikiran atau perasaan baik dan benar, sebab bahasa mereka di anggap umum tidak baik dan tidak benar. Celaka!

Kalau kita tidak percaya pada pihak Lembaga yang resmi dalam pengaturan berbahasa, siapa yang harus mengaturnya? Kan tadi dikatakan aturan itu tetap perlu.

Gejala pengaturan berbahasa dari atas itu tadi bukan suatu gejala yang universal. Itu produk sejarah yang relatif mutakhir. Pemikiran saya tentang ini banyak dipahami oleh pemikiran-pemikiran Ivan Illich tentang apa yang disebutnya kebudayaan *vernacular*. Yakni kebudayaan yang menjadi salah satu ciri kehidupan subsistens. Kehidupan yang berproduksi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk dipakai sendiri. Suatu kehidupan yang mandiri, secara relatif.

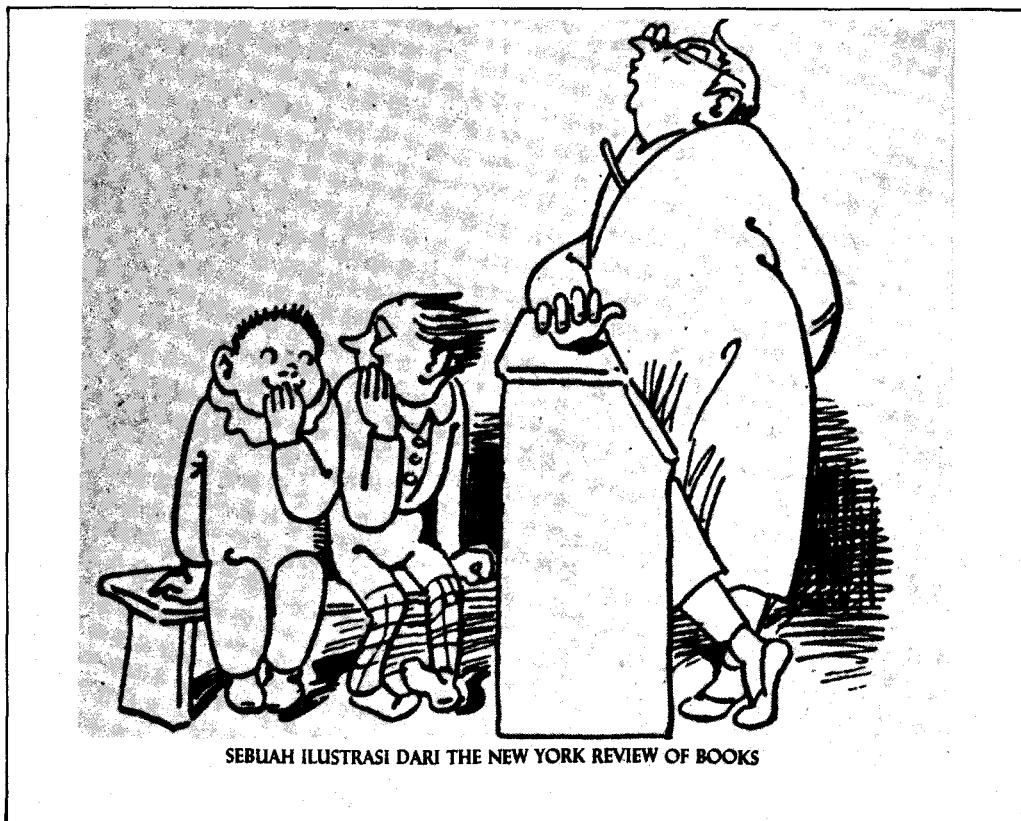
Biasanya kita sering dengar uraian orang di bidang studi ekonomi mengenai pola hidup subsistensi ini. Pada kehidupan seperti itu produksi kata, makna kata, aturan berbahasa dan sebagainya juga kurang-lebih mirip dengan pola produksi kebutuhan "ekonomi" mereka.

Pada kehidupan demikian itu semua orang bisa berbahasa. Kemampuan berbahasa dengan "baik" dan "benar" kurang-lebih merata pada sebagian besar anggota masyarakat. Kriteria baik dan benarnya itu tidak dibakukan secara statis. Tapi beragam-ragam, dengan beberapa ciri yang lebih lamban perubahannya. Tidak ditentukan oleh sekelompok penguasa belaka, untuk kemudian dijual lewat pelajaran berbahasa. Tetapi ditentukan oleh seluruh pemilik dan atau pemakai bahasa yang bersangkutan lewat kehidupan sosial. Terjadi tawar-menawar, mungkin, mengenai apa yang secara sosial dianggap baik dan benar. Juga mungkin dalam tawar-menawar itu ada yang sedikit lebih berkuasa daripada yang lain. Tapi perbedaan itu tidak sebesar seperti yang terjadi pada banyak masyarakat mutakhir kita.

Kehidupan sosial dan kehidupan berbahasa semacam itu memang punya beberapa kelemahan. Katakanlah, agak statis. Tapi jelas tidak sepenuhnya statis. Tidak seperti jaman industri komoditi, yang penuh dengan *progress* atau kemajuan. Tapi masalahnya, pada jaman industri yang penuh dengan *progress* atau kemajuan ini tidak terjadi pemeraatan kesempatan untuk menikmati *progress* atau kemajuan itu. Kemajuan-kemajuan yang kini berlimpah hanya dinikmati dan arahnya dikendalikan oleh sekelompok kecil elit yang berkuasa.

Perubahan kehidupan berbahasa dari kehidupan subsisten ke masa industri komoditi diibaratkan dengan bagus oleh Illich sebagai peralihan menyesuibayi dengan air susu ibu ke menyusui dengan susu botol. Dari sesuatu yang sehat, anugerah gratis untuk seluruh manusia dari Allah kepada produk pabrik milik juragan atau cukong yang mesti

Tidak ada bahasa macam apa pun yang baik dan benar secara obyektif. Kita mesti berbicara baik dan benar menurut siapa?



SEBUAH ILUSTRASI DARI THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS

dibeli di pasar. Karena sekarang kata, makna kata, ejaannya, dan tata-bahasa jadi produk komoditi, Illich pernah mengusulkan perlunya seorang akuntan yang bisa menghitung berapa beaya produksi setiap unit komoditikebahasan itu untuk melengkapi perhitungan GNP suatu negara. Illich melihat pada jaman ini dana uang dalam jumlah besar-besaran telah dianggarkan untuk mendikte apa yang mesti dinyatakan seseorang dalam berbahasa, kepada siapa ia berbicara, dan sebagainya.

Sekarang kita bicarakan kekuatan kata atau bahasa dalam perubahan masyarakat. Di awal wawancara tadi Anda katakan persoalan bahasa lebih penting daripada kesusastraan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat persoalan ini dalam konteks masyarakat Indonesia?

Dalam masyarakat lama di Nusantara terdapat tradisi kepercayaan akan besarnya kekuatan kata-kata pada perubahan atau penciptaan kenyataan. Misalnya dengan adanya mantera. Kata-kata dianggap dapat merubah kenyataan lama, atau penciptaan kenyataan baru. Orang

Jawa punya tradisi kepercayaan akan *bobot* pada nama seseorang. Dan sebagainya.

Hanya dalam pemikiran kaum sekolah kita yang "moderen", yakni ke-Barat-Barat-an itu, kata atau bahasa dianggap terpisah dari kenyataan. Ingat, ucapan Eropa lama yang sering dikutip di antara orang sekolah di Indonesia: apalah artinya sebuah nama?

Saya percaya bahasa dan kenyataan sosial saling terkait, bukan sekedar secara eksternal tetapi secara fundamental. Kaitan itu dalam keyakinan saya tidak seperti keyakinan tradisional yang tadi saya bilang. Keyakinan saya tentang kaitan itu tidak bersifat gaib atau metafisik, atau supernatural, seperti keyakinan orang tradisional tentang mantera. Keyakinan saya bertumpu pada penalaran dan pengamatan kenyataan konkret yang saling menguatkan. Akan saya coba terangkan satu persatu.

Secara teoritis dulu. Manusia itu tidak sekedar bekerja, bekerja, bekerja. Atau bertindak, bertindak, bertindak. Kalau cuma begitu itu kan sama dengan binatang atau bahkan mesin. Manusia punya kesadaran akan tindakannya, dan di antara kesadaran dan tindakannya itu terdapat hubungan timbal-balik. Saling mempengaruhi. Baik

Dengan bahasa suatu rezim bisa menguasai rakyatnya sampai ke lubuk hati dan alam pikiran yang paling dalam.

kesadaran mau pun tindakannya tidak sekedar pengulangan-pengulangan yang statis. Manusia itu mahluk kreatif, baik dalam hal kesadaran mau pun tindakan. Perubahan sosial yang nyata atau konkret membutuhkan tindakan manusia secara konkret. Tapi tindakan mengubah dunia nyata itu sedikit atau banyak ditentukan, dibatasi, dan dipengaruhi, antara lain oleh kesadarannya yang antara lain dibentuk oleh bahasa yang dikenalnya. Sebenarnya terjadi proses yang sebaliknya juga: kesadaran dan kebahasaan di tentukan, dipengaruhi, dibatasi sedikit-banyak oleh kondisi material hidupnya.

Bagaimana konkritnya dalam sejarah sosial di Indonesia? Saya ambil beberapa contoh besar saja. Supaya kelihatan menyolok, walau ada banyak contoh kecil-kecil dalam kehidupan kita setiap hari.

Contoh pertama dapat diambil dari pengalaman masyarakat Jawa sekitar dua abad yang lalu, ketika mulai diciptakan adanya bahasa Krama-Ngoko. Beberapa ahli sudah menunjukkan alasan diciptakannya dua tingkat bahasa itu: untuk mendapatkan legitimasi kaum atasan (Krama) yang mengusai kaum jelata (Ngoko). Sebentuk bahasa (Krama), diciptakan untuk membentuk suatu kenyataan baru, atau suatu pembaharuan kenyataan yang sedang berlangsung. Ini contoh baik untuk menunjukkan bahwa bahasa itu bukanlah sekedar "cermin" atau alat untuk menjelaskan kenyataan. Sampai sekarang saya masih sering mendengar orang sekolah tinggi kita yang tidak punya pandangan historis bisa-bisanya bilang: adanya tingkat-tingkat dalam bahasa Jawa itu *mencerminkan* tingkat-tingkat sosial dalam masyarakat Jawa. Dan hal itu dianggap sudah ada sejak adanya masyarakat Jawa. Di anggap menjadi ciri khas, atau hakekat ke-Jawa-an masyarakat Jawa. Tidak diamati sebagai produk dari suatu dinamika sejarah. Produk yang pada gilirannya memproduksikan sejarah berikutnya lagi.

Contoh lain adalah pengalaman bahasa Melayu yang menjadi induk bahasa Indonesia kita sekarang. Saya kira orang sudah tidak meragukan lagi jasa kekuatan bahasa Melayu lingua-franca dalam proses pembentukan kesadaran bersatu bangsa di antara masyarakat-masyarakat Hindia Belanda yang senasib sebagai kaum terjajah. Kesatuan berbahasa ini bukan sekedar cermin dari suatu kenyataan kesatuan rasa kebangsaan. Artinya, bukan ada kenyataan berbangsa satu itu secara utuh dulu, baru muncul kesatuan berbahasa pada masa berikutnya sebagai pantulan cerminnya.

Satu catatan tambahan perlu diberikan disini. Bahasa Melayu lingua-franca itu bukanlah bahasa yang dibakukan. Bukan bahasa yang diatur suatu lembaga penguasa. Tapi bahasa yang ber-bhinneka coraknya. Ada Melayu Jawa, Melayu Betawi, Melayunya Minang, Melayunya Aceh, Melayunya Cina, Melayunya orang-orang di bagian Indonesia Timur, dan sebagainya. Tapi toh mereka saling mengerti jika saling berkomunikasi. Dan bahasa semacam inilah yang membangkang kekuasaan penguasa penjajah. Dan justru persis kaum penguasa penjajahlah yang dalam sejarah di Indonesia ini mencoba membentuk suatu lembaga bahasa dan sastra untuk menghadang kekuatan perlawanan terhadap penjajah ini. Lembaga itu kemudian kita kenal dengan nama Balai Pustaka. Mereka memproklamasikan suatu bentuk bahasa Melayu yang dianggap baik dan benar. Yang mereka kuasai dan kendalikan perkembangannya lewat sekolah-sekolah bagi elit pribumi. Bahasa Melayu kaum penentang penjajah itu kemudian disebut sebagai bahasa Melayu pasaran. Bahasanya kaum tak tersekolah yang tidak baik dan

tidak benar. Artinya tidak baik dan tidak benar bagi kepentingan si penguasa penjajah.

Sampai sekarang pun bahasa menjadi salah andalan kekuatan politik dalam masyarakat kita. Sejak pulang dari AS, Arief Budiman memberikan kritik tajam terhadap pendekatan pembangunan di Indonesia yang cenderung mengandalkan kesadaran non material Yang hanya mengandalkan pendidikan, atau penataran semacam P4. Menurut dia, yang penting itu perubahan infrastruktur secara mendasar, sebagai perubahan sistem. Dalam banyak hal, saya setuju dengan Arief. Tapi satu hal yang kurang atau belum cukup ditekankan Arief selama ini. Yakni dialektika diantara infrastruktur dan alam kesadaran orang. Masalahnya, bagi saya, bukannya perubahan kesadaran itu tak punya arti, atau tak penting. Baik perubahan infrastruktur maupun kesadaran sosial sama-sama pentingnya, walau mungkin Arief sudah benar bahwa perubahan infrastruktur secara materiallah yang lebih menentukan, dan yang justru diabaikan selama ini di Indonesia.

Ini dibuktikan sendiri oleh Arief dengan menyebar-nyebarkan kesadaran alternatif (tentang pentingnya perubahan infrastruktur). Arief tidak membentuk infrastruktur alternatif yang berarti selama ini. Misalnya saja, dia tidak membentuk partai politik yang baru. Dia tidak membentuk suatu organisasi kekuatan bersenjata, misalnya. Saya yakin Arief menyadari betul hal-hal beginian, tapi hal-hal beginian kurang (walau mungkin sudah sedikit-sedikit) dinyatakannya secara publik. Dan banyak publiknya yang kemudian fanatic pada Arief berpikir sepihak atau reduksionis, atau mekanistik dalam memahami proses perubahan sosial.

Sebenarnya masih ada banyak contoh lain dalam sejarah kita yang juga menunjukkan pentingnya kekuatan kata-kata. Sukarno, misalnya, secara tepat digambarkan oleh seorang intelektual Indonesia, sebagai tokoh yang mengandalkan gembar-gembor kata-kata untuk menghimpu kekuatan nasional. Kekuatan nasional itu dibentuknya tidak dengan senjata api dan tanpa pertumpahan darah. Tentu saja, dia tidak berperan sendirian dalam hal ini.

Pokoknya, kata-kata atau bahasa itu punya kekuatan yang teramat dahsyat. Jauh diluar bayangan banyak elit tersebut kita yang masih mengunyah keyakinan tentang "apakah artinya sebuah kata?" Yang memandang bahasa dan kenyataan sosial sebagai dua hal yang saling terpisah. Dahsyat sekali kekuatan bahasa itu, sampai-sampai saya pernah berpikir dia tak kalah kuat dengan misalnya kekuatan suatu Angkatan Bersenjata. Dengan bahasa, suatu rejim bisa menguasai rakyatnya secara internal sampai kelubuk hati dan alam pikiran yang terdalam. Dan penguasaan itu berlangsung setiap detik dalam kehidupan rakyat yang berbahasa itu, bahkan dalam mimpi-mimpinya sewaktu tidur. Suatu hal yang tak dapat diharapkan dari rejim yang hanya mengandalkan kekuatan Angkatan Bersenjata.

Celakanya kaum ahli kita tak memperhitungkan hal-hal ini. Di sekolah, di ceramah atau seminar, mereka masih asyik berjungkir-balik dengan akrobatis awalan, akhiran, ejaan, peng-Indonesia-an istilah asing, masalah penyingkatan kata, dan soal-soal semacam itu. Para dosen dan mahasiswa yang terkecoh, dan kerepotan mempelajari firman-firman kaum ahli bahasa itu, sambil mengejek orang-orang yang dianggap tidak berbahasa Indonesia secara baik dan benar.